

**DAMPAK KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI DAN PERAN NEGARA
TERHADAP PENGHAPUSAN PENERIMA BANSOS DI KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2025**

Najib Royyan Zamzami¹, Mulyati², Muhammad Yazid Adillah³, Muhammad Permadi⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan, Indonesia

Najibroyyan234@gmail.com ¹

Myyattiii@gmail.com ²

Nziedghostfinger72@gmail.com ³

Muhammadpermadina@gmail.com ⁴

Keywords

*socio-economic inequality,
elimination of social
assistance, poverty,
Kuningan Regency, role of
the state*

Abstract

This study aims to analyze the impact of socio-economic inequality and the role of the state in eliminating social assistance (bansos) recipients in Kuningan Regency in 2025. A total of 34,804 people were removed from the list of beneficiaries as a result of updating data based on the National Extreme Social Welfare Integrated Data (DT-SEN) and P3KE. The approach used in this study is qualitative descriptive, with data collection through documentation studies, in-depth interviews, and secondary data analysis from BPS and the local Social Service. The results of the study show that the elimination of social assistance has a significant impact on increasing the poverty rate again from 11.88% (2024) to 12.7% (2025), as well as strengthening social inequality as reflected in the stagnant Gini ratio at 0.388. The state's response through local governments still faces challenges in the form of minimal socialization, limited field officers, and suboptimal empowerment programs as an alternative to social assistance. These findings suggest that the data updating process needs to be accompanied by a participatory approach, fair assistance, and guarantees of socio-economic transition so as not to create new poverty. This study recommends an evaluation of social assistance policies based on social justice and digital inclusion.

Kata Kunci

ketimpangan sosial
ekonomi, penghapusan
bansos, kemiskinan,
Kabupaten Kuningan, peran
negara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketimpangan sosial ekonomi dan peran negara terhadap penghapusan penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kuningan pada tahun 2025. Sebanyak 34.804 jiwa dihapus dari daftar penerima manfaat sebagai hasil dari pemutakhiran data berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrem Nasional (DT-SEN) dan P3KE. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan analisis data sekunder dari BPS serta Dinas Sosial setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan bansos berdampak signifikan terhadap peningkatan kembali angka kemiskinan dari 11,88% (2024) menjadi 12,7% (2025), serta memperkuat ketimpangan sosial yang tercermin dari rasio Gini yang stagnan di angka 0,388. Respons negara melalui pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa minimnya sosialisasi, keterbatasan petugas lapangan, dan belum optimalnya program pemberdayaan sebagai alternatif bansos. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data perlu disertai pendekatan partisipatif, pendampingan yang adil, serta jaminan transisi sosial-ekonomi agar tidak menciptakan kemiskinan baru. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi kebijakan bansos berbasis keadilan sosial dan inklusi digital.

Corresponding Author: Najib Royyan Zamzami

E-mail: Najibroyyan234@gmail.com



PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial ekonomi merupakan salah satu persoalan struktural yang hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional (Edison & Andriansyah, 2023). Ketimpangan tidak hanya tercermin dari disparitas pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan jaminan perlindungan sosial (Hababil et al., 2024). Di Indonesia, meskipun telah terjadi penurunan angka kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan pengeluaran penduduk masih cukup signifikan. Hal ini terlihat dari rasio Gini nasional yang masih berada pada angka 0,388 per Maret 2023, yang menunjukkan adanya kesenjangan distribusi kekayaan dan sumber daya yang cukup besar antar kelompok masyarakat (Safitri & Susilo, 2024).

Dalam konteks daerah, Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Kabupaten Kuningan mencapai 11,88% pada tahun 2024, lebih tinggi dari rata-rata provinsi (Saputra, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut masih berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan. Selain itu, banyak masyarakat menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada berbagai skema bantuan sosial (bansos) yang disediakan oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Pratiwi & Imsar, 2022).

Namun, pada awal tahun 2025, terjadi peristiwa penting yang mengguncang kehidupan sosial masyarakat Kuningan, yaitu penghapusan secara massal sebanyak 34.804 keluarga dari daftar penerima bantuan sosial. Keputusan ini dilakukan sebagai bagian dari proses pemutakhiran data melalui mekanisme Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrem Nasional (DT-SEN) dan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS) yang kini bertransformasi menjadi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Meski tujuannya adalah agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses ini menimbulkan berbagai persoalan baru (Rahma et al., 2025).

Masyarakat yang sebelumnya tergantung pada bantuan tersebut kini menghadapi ketidakpastian ekonomi (Manik et al., 2025). Banyak dari mereka mengaku tidak mengetahui alasan penghapusan tersebut, dan merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses verifikasi data. Di sisi lain, terdapat juga kekhawatiran mengenai akurasi dan validitas data yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menetapkan siapa yang berhak menerima bantuan (Rahmansyah et al., 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas peran negara dalam melindungi masyarakat rentan dari dampak kebijakan yang berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial ekonomi.

Dalam kerangka inilah, studi ini menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana ketimpangan sosial ekonomi di Kabupaten Kuningan mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap kebijakan penghapusan bansos, serta sejauh mana peran negara hadir dalam mengantisipasi dan memitigasi dampak sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini juga akan membedah dinamika kebijakan, proses pendataan, serta efektivitas respons pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan warga yang terdampak, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan fokus pada kasus Kabupaten Kuningan, kajian ini tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga mencerminkan tantangan nasional dalam mewujudkan perlindungan sosial yang adil dan responsif di tengah ketimpangan sosial ekonomi yang terus berlanjut.

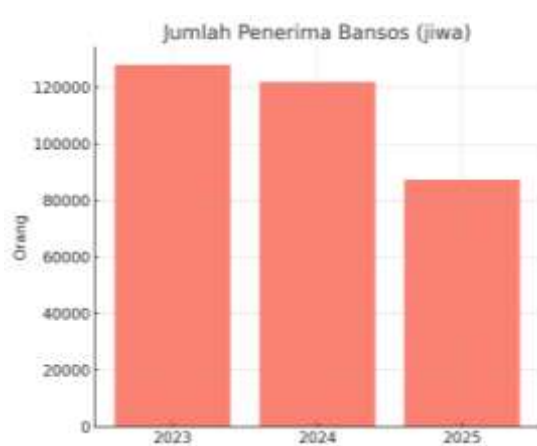
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dampak ketimpangan sosial ekonomi dan peran negara terhadap penghapusan penerima bansos di Kabupaten Kuningan pada tahun 2025. Data dikumpulkan melalui dua sumber utama, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan dan BPS Provinsi Jawa Barat, serta dokumen pemerintah terkait pengelolaan bansos seperti laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), dan berita-berita dari media daring. Data ini digunakan untuk memetakan tingkat kemiskinan, rasio gini, jumlah penerima bansos, dan perubahan data penerima bantuan dari tahun sebelumnya ke tahun 2025.

Sementara itu, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yang terdiri dari pejabat Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, petugas pendata DT-SEN, serta masyarakat yang terdampak langsung dari penghapusan bansos. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang relevan dan dapat memberikan informasi mendalam mengenai proses dan dampak kebijakan ini. Hasil wawancara dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, persepsi, dan pengalaman masyarakat terhadap penghapusan bansos, serta mengevaluasi sejauh mana negara hadir dalam mengantisipasi dampak tersebut melalui intervensi kebijakan, verifikasi ulang data, dan program pemberdayaan ekonomi. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan tetap mengedepankan validitas dan triangulasi data dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penurunan Jumlah Penerima Bansos



Gambar 1. Jumlah Penerima Bansos Kabupaten Kuningan Tahun 2023–2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan drastis. Data dari Dinas Sosial menunjukkan bahwa penerima bansos yang semula berjumlah sekitar 122.000 jiwa pada tahun 2024, turun menjadi 87.400 jiwa pada tahun 2025. Artinya, sekitar 34.804 jiwa atau 28,5% dari total penerima dihapus dari daftar penerima manfaat.

Penurunan ini terjadi setelah pemerintah menerapkan validasi ulang melalui program DT-SEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrem Nasional) dan sinkronisasi data dengan P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Proses ini menghasilkan penyisiran ulang terhadap rumah tangga yang dianggap sudah tidak memenuhi kriteria.

Dampak Terhadap Tingkat Kemiskinan

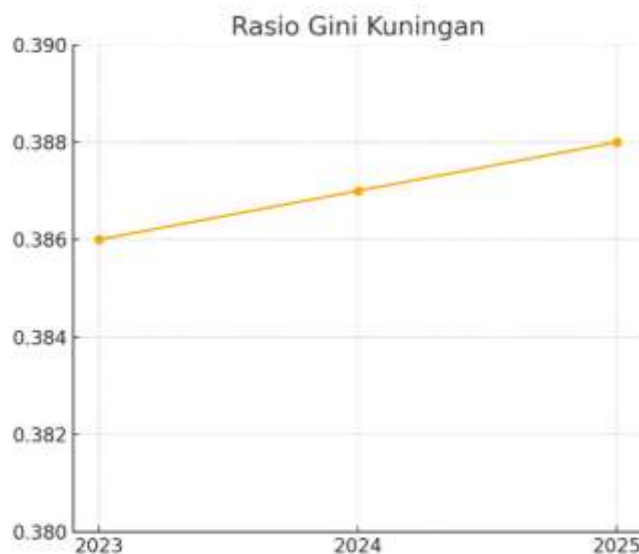


Gambar 2. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2023–2025

Dampak nyata dari penghapusan ini adalah kembalinya tren peningkatan angka kemiskinan. Setelah mengalami penurunan dari 12,3% (2023) menjadi 11,88% (2024), tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan kembali naik ke angka 12,7% pada 2025. Warga yang sebelumnya tergolong sebagai "hampir miskin" atau "rentan miskin" menjadi kelompok paling terdampak (Asmuni, 2020).

Banyak dari mereka kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti membeli sembako, membayar sekolah anak, hingga mengakses layanan kesehatan. Sebagian besar rumah tangga terdampak tidak memiliki cadangan ekonomi atau sumber pendapatan alternatif setelah pencabutan bantuan (Lazuardi et al., 2025).

Ketimpangan Sosial Meningkat



Gambar 3. Tren Rasio Gini Kabupaten Kuningan Tahun 2023–2025

Ketimpangan ekonomi yang diukur melalui rasio Gini menunjukkan tren stagnan namun tetap tinggi, yakni dari 0,386 pada 2023 menjadi 0,388 pada 2025. Ini mencerminkan bahwa pengurangan jumlah penerima bansos tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan kelompok bawah, dan malah memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.

Data wawancara dengan warga juga menunjukkan bahwa masyarakat merasa proses seleksi bansos tidak adil. Mereka menilai ada warga yang "lebih mampu" namun tetap terdaftar, sementara keluarga mereka yang masih miskin justru dihapus tanpa kejelasan. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial di tingkat komunitas.

Respons Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, menyatakan bahwa penghapusan tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional dan mereka hanya menjalankan verifikasi berdasarkan data yang dikirim pusat. Meski begitu, mereka juga mengakui bahwa masih terdapat kelemahan dalam proses verifikasi karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya sosialisasi.

Untuk meredam gejolak, Dinsos membuka layanan pengaduan dan menyediakan skema pendampingan pemutakhiran data, namun banyak warga mengaku tidak tahu-menahu soal prosedur ini. Selain itu, pemerintah mulai menggulirkan program pemberdayaan seperti pelatihan UMKM dan bantuan alat produksi, namun belum merata menjangkau seluruh wilayah kecamatan (Indika & Marliza, 2019).

Strategi Penanganan Pasca-Penghapusan Bansos

Menggunakan penanggulangan bantuan sosial terhadap lebih dari 34.000 warga di Kuningan, langkah terencana penting guna mengurangi efek negatif bagi mereka yang terkena dampak.

Cara yang dapat ditempuh adalah merancang program pelestarian sosial-ekonomi yang sesuai dengan keadaan daerah dan tanggap pada keperluan kelompok rentan.

Survei mengungkapkan bahwa sebagian warga yang tak lagi menerima bantuan sosial kini beralih mencari nafkah di bidang informal, misalnya dengan berjualan kecil-kecilan atau bekerja serabutan. Sayangnya, tanpa modal yang cukup dan pelatihan yang sesuai, usaha ini belum menghasilkan hasil yang diharapkan. Maka dari itu, peran aktif pemerintah sangat diperlukan dalam wujud :

1. Mempercepat Akses Bantuan Usaha Mikro

Jangkauan program bantuan modal tunai untuk mantan penerima bantuan sosial yang memiliki bakat wirausaha sebaiknya kurang lebih. Dukungan ini sangat penting agar masyarakat yang terkena dampak dapat memulai usaha kecil dan meningkatkan pendapatan keluarga secara mandiri.

2. Pelatihan dan Bimbingan Keterampilan

Pemerintah sebaiknya menyediakan pelatihan yang sesuai dengan potensi daerah, misalnya pertanian, kerajinan, atau sektor jasa. Bimbingan yang terus - menerus juga diperlukan agar usaha berhasil dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.

3. Digitalisasi Layanan Sosial

Sistem layanan sosial berbasis digital, termasuk layanan pengaduan dan pengecekan data bantuan sosial, harus diperkuat secara transparan dan mudah diakses masyarakat. Ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kebijakan sosial yang dijalankan.

4. Penyatuan Data DTKS dengan Cara Partisipatif

Pemerintah perlu melibatkan perangkat desa, tokoh, dan relawan sosial dalam memperbarui data kesejahteraan agar hasilnya lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Tantangan Struktural dan Solusi Kebijakan dalam Pengelolaan Bansos

Penghilangan bantuan sosial secara besar -besaran di Kuningan mencerminkan masalah mendasar yang lebih besar dalam kerangka perlindungan sosial di seluruh Indonesia. Riset ini menarik sejumlah kendala , termasuk:

1. Masalah data terpusat yang kurang melibatkan daerah pemerintah daerah jadi kesulitan memverifikasi dan memperbarui data karena semua proses dikendalikan oleh pusat, melalui sistem DT-SEN dan P3KE. Karena pemerintah desa dan warga tidak ikut dilibatkan, bantuan jadi sering salah sasaran.
2. Keterbatasan dinas sosial di daerah biasanya kekurangan staf dan perlengkapan untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan secara menyeluruh (Putra et al., 2018). Hal ini mempengaruhi keakuratan data dan membuat respon terhadap keluhan warga jadi lambat.
3. Tidak ada cara yang jelas untuk memulihkan kondisi penerima bantuan setelah bantuan dihentikan setelah bantuan sosial dihilangkan, tidak ada cara yang cukup baik untuk mengalihkan penerima ke program perlindungan sosial lainnya. Alhasil, mereka yang rentan menjadi kembali miskin.
4. Informasi yang kurang terbuka dan sulit diakses masyarakat informasi tentang mengapa bantuan dicabut, bagaimana cara mengirimkan data ulang, dan bagaimana cara menyampaikan keluhan tidak sampai dengan baik ke masyarakat (Nasran, 2023). Banyak warga yang bingung kenapa status mereka berubah dan tidak tahu harus mengadu ke siapa.

Rekomendasi Solusi Kebijakan

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, beberapa solusi kebijakan yang disarankan antara lain:

1. Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Pemutakhiran Data. Melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat dalam proses pemadanan data agar lebih akurat dan mencerminkan kondisi lapangan (Arrahma et al., 2024).
2. Integrasi Program Bansos dan Pemberdayaan. Penghapusan bansos harus diiringi dengan pemberian akses pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, atau padat karya lokal yang dikelola langsung oleh daerah.
3. Peningkatan Literasi Sosial dan Digital. Masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang hak dan mekanisme kebijakan sosial melalui program sosialisasi, termasuk penggunaan aplikasi digital atau posko bantuan langsung di desa (Alam et al., 2023).

4. Audit dan Evaluasi Berkala terhadap Akurasi Data DTKS/DT-SEN. Pemerintah pusat perlu menyediakan ruang evaluasi terbuka dan akuntabel bagi daerah dalam menilai efektivitas sistem pensasaran.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kuningan pada tahun 2025 memiliki dampak signifikan terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Ketimpangan sosial ekonomi yang telah berlangsung dalam jangka panjang menjadi faktor yang memperbesar risiko ketika bansos dihentikan secara tiba-tiba. Penghapusan lebih dari 34 ribu jiwa dari daftar penerima bantuan, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi data dan efektivitas program sosial, justru menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dari 11,88% menjadi 12,7% serta memperburuk ketimpangan yang ditunjukkan oleh stagnasi rasio Gini di angka 0,388.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran negara, khususnya pemerintah daerah, masih belum optimal dalam memberikan jaminan perlindungan sosial pada masa transisi. Kurangnya sosialisasi, keterbatasan petugas verifikasi, dan belum menyeluruhnya program pemberdayaan menjadi kendala utama dalam mencegah dampak negatif kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif, berbasis data yang valid, serta memperkuat kehadiran negara dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan berkelanjutan agar penghapusan bansos tidak menciptakan kemiskinan baru maupun memperdalam ketimpangan yang ada.

BIBLIOGRAFI

- Alam, A. Z. I., Zaid, M., & Alam, A. A. F. (2023). Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan di Indonesia sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0. *Journal Social Society*, 3(2), 95–112.
- Arrahma, F., Pahlevi, R., Faraby, M. Y., Setiawan, B., & Latif, M. G. (2024). Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Terhadap Perkembangan Desa. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(6), 120–131.
- Asmuni, A. (2020). Gotong Royong Saat Pandemi: Ketepatan Bantuan Sosial Bagi Terdampak. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 3(1), 20–42.
- Edison, E., & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan sosial: Tinjauan terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia. *Journal Development*, 11(2), 134–146.
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis pengaruh pemerataan ekonomi dalam upaya menghapus ketimpangan sosial-ekonomi antar masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9.
- Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Mbia*, 18(3), 49–66.
- Lazuardi, D., Gustina, I., Wahyuni, P., & Rinaldi, M. (2025). Peningkatan Akses Layanan Dasar Untuk Mengurangi Kemiskinan: Pendekatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan. *Lebah*, 18(2), 69–76.
- Manik, D. T. S., Nasution, N. F., & Safitri, S. (2025). Aspek Ekonomi dan Sosial. *Journal of Management and Creative Business*, 3(1), 122–131.
- Nasran, M. A. M. (2023). *STRATEGI KOMUNIKASI PENANGANAN KELUHAN ADUAN MASYARAKAT MELALUI (DISKOMINFO) PROGAM "LAPOR BUPATI" PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Pratiwi, D. C., & Imsar, I. (2022). Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5684–5690.
- Putra, S. A., Stiawati, T., & Atoullah, A. (2018). *Pengawasan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Rahma, A., Lestari, D. A., Nasiroh, R. A., & Afif, A. (2025). Menggali Akar Permasalahan: Kajian Mendalam Terhadap Data Kemiskinan Dan Mekanisme Bantuan Sosial. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 192–198.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. T. S. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102.
- Safitri, P. D., & Susilo, E. (2024). Analisis Pengaruh Inklusifitas Keuangan Syariah, Pendidikan Dan

Najib Royyan Zamzami, Mulyati, Muhammad Yazid Adillah, Muhammad Permadi
Dampak Ketimpangan Sosial Ekonomi dan Peran Negara Terhadap Penghapusan Penerima Bansos di
Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Ketimpangan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun (2019-2023). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 265–288.

Saputra, E. R. N. (2025). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024*. EKOS UIN Siber Syekh Nurjati.